

**ANALISIS KUALITAS REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)
PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA***QUALITY ANALYSIS OF REGIONAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORT REVIEWS (LKPD) AT
REGIONAL INSPECTORATES NORTH SULAWESI PROVINCE*

Oleh:

**Richard Sarmiento Giam¹
Albert Otniel Rondonuwu²**¹²Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

E-mail:

¹richadgiam@gmail.com²rainy121314@gmail.com

Abstrak: Sebagai pertanggungjawaban kepada publik, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Laporan Keuangan atas aktivitas dan kinerja finansial yang dilaksanakannya. Sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengharuskan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) direviu oleh APIP Inspektorat Daerah sebelum diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk diperiksa. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi Kualitas Reviu LKPD yang dilaksanakan APIP pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Sebanyak 30 APIP baik Auditor maupun PPUPD menjadi responden pada studi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Latar Belakang Pendidikan APIP (X_1) berpengaruh tidak signifikan terhadap Kualitas Reviu LKPD secara parsial. Namun variabel Prosedur Reviu (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Reviu LKPD. Sedangkan secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Reviu LKPD.

Kata Kunci: kualitas reviu LKPD, latar belakang pendidikan, prosedur reviu

Abstract: As accountability to the public, the Regional Government is obliged to compile a Financial Report on the activities and financial performance it carries out. In accordance with government regulations that require the Regional Government Financial Reports (LKPD) to be reviewed by the Regional Inspectorate APIP, before being submitted to the Supreme Audit Agency for examination. The purpose of the study was to analyze the factors that affect the quality of the LKPD review carried out by APIP at the Regional Inspectorate of North Sulawesi Province. This type of research is quantitative associative using multiple linear regression analysis method. A total of 30 APIP both auditors and PPUPD were respondents in this study. The results showed that APIP's educational background (X_1) had no significant effect on the quality of the LKPD review partially. However, the review procedure variable (X_2) has a significant effect on the quality of the LKPD review. Meanwhile, simultaneously, the two variables significantly influences the quality of LKPD review.

Keywords: LKPD review quality, educational background, review procedure

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dituntut untuk transparan dan akuntabel kepada publik atas aktivitas dan kinerja finansial yang dilaksanakan, oleh sebab itu akuntansi disektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan laporan keuangan direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebelum diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit. Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilakukan oleh Inspektorat

Daerah (Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota). Pelaksanaan reviu merupakan dasar dibuatnya surat pernyataan tanggung jawab (Statement of Responsibility) menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah atas laporan keuangan instansinya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 juga menyebutkan bahwa reviu LKPD bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Arnes (2008) menyebutkan bahwa salah satu faktor penyebab buruknya kualitas laporan keuangan daerah adalah karena masih rendahnya peran Inspektorat dalam melakukan fungsi pengawasannya sehingga laporan keuangan tidak memiliki kualitas yang baik sebelum diperiksa oleh BPK. Peran APIP masih terbatas dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan keuangan daerah. APIP belum melakukan pengawasan secara terus-menerus sejak proses penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran. Padahal keberadaan APIP merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pemerintahan daerah karena merupakan lini terdepan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan sebagai deteksi awal jika terjadi penyimpangan.

Diharapkan penyajian LKPD dapat dikurangi kesalahannya dengan dilaksanakan reviu menggunakan pedoman reviu atas LKPD yang berbasis akrual yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Dalam Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021 disampaikan bahwa BPK Memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021. Pencapaian opini WTP ini adalah yang kedelapan kali berturut-turut bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (<https://sulut.bpk.go.id/-2022>).

Uraian di atas menunjukkan bahwa kualitas hasil reviu atas LKPD yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah (APIP) memiliki peran besar dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, melalui pengawasan keuangan daerah yang berkualitas. Reviu merupakan salah satu komponen dari sistem peringatan dini (*early warning system*) yang penting dan diharapkan mampu untuk mengurangi kesalahan dalam menyajikan informasi keuangan.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh:

1. Latar Belakang Pendidikan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang melaksanakan Reviu terhadap Kualitas Hasil Reviu LKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Prosedur Reviu LKPD terhadap Kualitas Hasil Reviu LKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Latar Belakang Pendidikan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Prosedur Reviu LKPD terhadap Kualitas Hasil Reviu LKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Reviu Laporan Keuangan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 menjelaskan Reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan, dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas Laporan Keuangan (LK) agar LK tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Keyakinan terbatas tersebut karena dalam reviu tidak dilakukan pengujian atas kebenaran substansi dokumen sumber. Pada praktiknya, pelaksanaan kegiatan reviu seringkali memiliki persamaan dengan pelaksanaan kegiatan audit. Untuk menghindari hal tersebut, maka perlu diberikan batasan-batasan yang membedakan antara kegiatan reviu dengan kegiatan audit.

Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu pengetahuan dan ketrampilan serta kebiasaan seseorang atau sekelompok orang yang diajarkan dan dilatih ke generasi berikutnya. Pendidikan biasanya dibagi menjadi beberapa tahapan pendidikan diantaranya prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan berlanjut kepada pendidikan di

perguruan tinggi / universitas maupun magang. Pendidikan didapatkan pula dari fakta maupun kondisi tentang sesuatu dengan baik didapat lewat pengalaman dan juga pelatihan. Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam, selain itu auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan semakin kompleks (Meinhard et al, 1987 dalam Harhinto (2004:35).

Prosedur Reviu LKPD

Prosedur adalah suatu metode berupa teknik yang dipergunakan auditor dalam melaksanakan tugas untuk mengumpulkan dan menganalisa bukti dan keterangan sehingga dapat diyakini kebenarannya. Prosedur reviu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 adalah penelusuran angka, permintaan keterangan, dan prosedur analitis. Prosedur reviu harus dijelaskan kepada anggota tim reviu sehingga dalam penugasan masing-masing anggota tim mengetahui dan memahami langkah-langkah dan tugas yang harus dilakukan. Pelaksanaan reviu tanpa prosedur maka kualitas dari hasil reviu yang dilakukan belum dapat memberikan informasi bahwa LKPD telah berdasarkan pada SPI yang memadai dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual.

Kualitas Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan akan berguna (usefull) apabila LK tersebut memenuhi standar kualitatif. Karakteristik kualitatif LK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah:

- 1) Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi LK yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur: (1) manfaat umpan balik (*feedback value*), (2) manfaat prediktif (*predictive value*), (3) tepat waktu (*timelines*), dan (4) lengkap.
- 2) Andal, yaitu informasi dalam LK bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik: (1) penyajian jujur, (2) dapat diverifikasi (*verifiability*), dan (3) netralitas.
- 3) Dapat dibandingkan, informasi yang termuat dalam LK akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan LK periode sebelumnya atau LK entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
- 4) Dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam LK dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Maulana, Djamhuri dan Purwanti (2017) bertujuan untuk menjelaskan pengaruh dari kompetensi, komitmen organisasi dan sistem pengendalian intern (SPI) terhadap kualitas reviu dan implikasinya terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Reviu dalam hal ini adalah reviu LKPD. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh kompetensi, komitmen organisasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas reviu, sedangkan uji terhadap pengaruh kualitas reviu terhadap kualitas LKPD menggunakan analisis regresi linier sederhana. Penelitian dilakukan terhadap aparat pengawas (auditor APIP) pada inspektorat daerah di 8 (delapan) wilayah eks Karesidenan Malang. Hasil

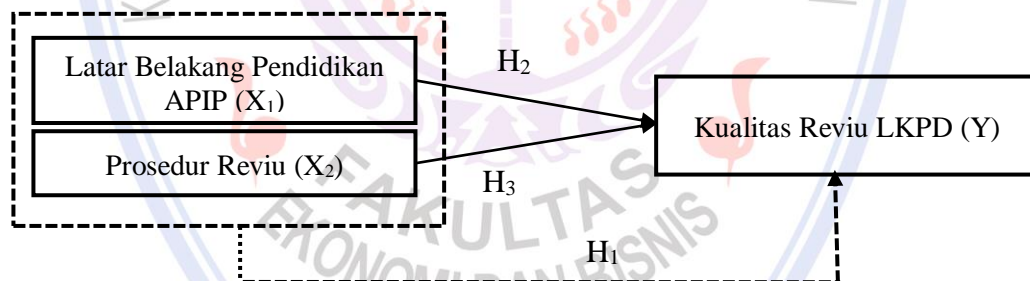
penelitian membuktikan bahwa kualitas reuiu dipengaruhi oleh kompetensi, komitmen organisasi dan sistem pengendalian intern dan kualitas reuiu berpengaruh terhadap kualitas LKPD.

Penelitian Juanda dan Nauli (2018) bertujuan untuk mengetahui pengaruh review laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintah sebagai variabel moderasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan metode survei yang dilakukan melalui kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh inspektorat di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat fungsional dan pejabat lainnya yang tergabung dalam tim Review pada masing-masing inspektorat di seluruh wilayah di Provinsi Lampung. Hasil analisis data menunjukkan bahwa proses review laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintah oleh APIP tidak memoderasi hubungan antara proses review dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Penelitian Yudha, Sujana dan Purnamawati (2017) bertujuan untuk menguji pengaruh kompleksitas audit, due professional care, tekanan anggaran waktu, dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit dengan variabel moderasi pemahaman terhadap sistem informasi. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor senior dan auditor junior pada KAP di Bali, dengan total populasi sebesar 90 auditor. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria (1) Memiliki pendidikan minimal sarjana (2) Mempunyai pengalaman kerja minimal satu tahun, karena telah memiliki waktu dan pengalaman untuk beradaptasi serta menilai kinerja dan kondisi lingkungan kerjanya sehingga diperoleh jumlah sampel sebesar 47 responden. Analisis data yang digunakan dalam pengujian ini adalah regresi berganda dan regresi interaksi dengan menggunakan program SPSS 23.00. Hasil dari pengujian hipotesis didalam penelitian ini menunjukkan bahwa, variabel kompleksitas audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, namun dengan adanya dari interaksi variabel moderasi pemahaman terhadap sistem informasi merubah arah menjadi positif. Sedangkan, variabel due professional care, tekanan anggaran waktu, dan pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit demikian juga dengan adanya ineraksi dari variabel moderasi pemahaman terhadap sistem informasi variabel due professional care, tekanan anggaran waktu, dan pengalaman auditor tetap berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Model Penelitian

Kerangka Konseptual Penelitian



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Kajian Teori dan Kajian Empirik, 2020

Hipotesa Penelitian

1. Latar Belakang Pendidikan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang melaksanakan Reviu berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Hasil Reviu LKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Prosedur Reviu LKPD berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Hasil Reviu LKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Latar Belakang Pendidikan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Prosedur Reviu LKPD berpengaruh berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Hasil Reviu LKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif asosiatif, yaitu penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2014). Hubungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hubungan kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat, yang terdiri dari variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan dependen (variabel yang dipengaruhi) menurut Sugiyono (2014).

Populasi, Besaran Sampel, dan Teknik Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang telah memiliki sertifikasi Auditor maupun Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) baik yang melakukan reviu LKPD maupun reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel bersifat purposive sampling. Menurut Sugiyono (2014) bahwa: purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Penggunaan teknik Purposive Sampling dimaksudkan karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Kriteria tersebut adalah responden merupakan periviu yang melaksanakan reviu laporan keuangan. Pada studi ini, besarnya sampel ditetapkan sebanyak 30 responden.

Jenis Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain data kuantitatif dan data kualitatif. Dengan jenis data primer, yaitu data yang diperoleh dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui kuesioner (angket) dan interview (wawancara). Penggunaan wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan persetujuan serta mendapatkan data awal berkaitan informasi objek penelitian guna menentukan sampel responden dalam penelitian ini. Penggunaan kuesioner dimaksudkan untuk mendapatkan data primer dari responden yakni para Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Teknik Analisis

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (independen) yang jumlahnya lebih dari satu terhadap variabel terikat (dependen). Model analisis regresi linier berganda dilakukan untuk menjelaskan hubungan dan seberapa besar pengaruhnya antar variabel.

Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian antara variabel dependen dengan variabel independen dengan menggunakan regresi linier berganda, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Data diolah menggunakan komputer dengan bantuan software program SPSS. Dengan persamaan regresi:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kualitas Reviu LKPD

X₁ = Latar Belakang Pendidikan

X₂ = Prosedur Reviu

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

E = kemungkinan Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 1. Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a		
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	12.028	7.005	
	SUM_X1	.011	.194	.010
	SUM_X2	.469	.134	.594

a. Dependent Variable: Total_Y

(Sumber: Data primer diolah tahun 2022)

Persamaan Regresi: $Y = 12,028 + 0,011 X1 + 0,469 X2 + e$

Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 12,028 artinya jika Latar Belakang Pendidikan (X1) dan Prosedur Audit (X2) bernilai Nol, maka nilai variabel dependen Kualitas Reviu LKPD adalah sebesar 12,028.
2. Nilai koefisien Latar Belakang Pendidikan (X1) sebesar 0,011, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Latar Belakang Pendidikan (X1) mengalami kenaikan 1 point atau 1%, maka Kualitas Reviu LKPD (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,011 per 1 point/ 1%. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara X1 dan Y, semakin naik X1 maka Y akan semakin naik.
3. Nilai Koefisien Prosedur Reviu (X2) sebesar 0,409 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Prosedur Reviu (X2) mengalami kenaikan 1 poin atau 1%, maka Kualitas Reviu (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,409. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara X2 dan Y, semakin naik X2 maka Y akan semakin naik.

Uji Hipotesis

Uji Simultan

Tabel 2. Uji Simultan (F)

Model		ANOVA ^a				
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	115.132	2	57.566	7.533	.003 ^b
	Residual	206.334	27	7.642		
	Total	321.467	29			

a. Dependent Variable: SUM_Y

b. Predictors: (Constant), SUM_X2, SUM_X1

(Sumber: Data primer diolah tahun 2022)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat nilai F hitung sebesar 7.533 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,003. Terlihat bahwa nilai probabilitas signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya Hipotesis yang menyatakan bahwa "Latar Belakang Pendidikan dan Prosedur Reviu berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Reviu LKPD Provinsi Sulawesi Utara" terbukti / diterima. Kesimpulannya adalah bahwa variabel Latar Belakang Pendidikan dan Prosedur Reviu, secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Reviu LKPD (Y).

Uji Parsial

Berdasarkan tabel 3, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari tabel terlihat bahwa nilai koefisien regresi Latar Belakang Pendidikan memiliki tingkat signifikansi 0,954, nilai ini lebih besar dari 0,05 atau nilai $\text{sig} > \alpha$, ini berarti hipotesis penelitian yang menyatakan "Latar Belakang Pendidikan diduga secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Reviu LKPD" ditolak. Selain menggunakan nilai probabilitas atau nilai sig, metode yang lain yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan nilai t hitung dibandingkan dengan nilai t tabel. Dalam kasus ini, t hitung memiliki nilai 0,058

sedangkan t tabel 2,048, ini berarti t hitung $<$ t tabel sehingga hipotesis ini dalam penelitian ditolak. Kesimpulannya adalah bahwa variabel Latar Belakang Pendidikan secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kualitas Reviu LKPD.

2. Dari tabel terlihat bahwa nilai koefisien regresi Prosedur Reviu memiliki tingkat signifikansi 0,002, nilai ini lebih kecil dari 0,05 atau nilai $\text{sig} < \alpha$, ini berarti hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan "Prosedur Reviu LKPD diduga berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Reviu LKPD" diterima. Selain menggunakan nilai profitabilitas atau nilai sig , metode yang lain yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan nilai t hitung dibandingkan dengan nilai t tabel. Dalam kasus ini, t hitung memiliki nilai 3,495 sedangkan t tabel 2,048. Ini berarti t hitung $>$ t tabel sehingga hipotesis penelitian diterima. Kesimpulannya adalah bahwa variabel Prosedur Reviu LKPD secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Reviu LKPD.

Tabel 3. Uji Parsial (t)

Model	Coefficients ^a				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	12.028	7.005			1.717	.097
SUM_X1	.011	.194	.010		.058	.954
SUM_X2	.469	.134	.594		3.495	.002

a. Dependent Variable: SUM_Y

(Sumber: Data primer diolah tahun 2022)

Uji Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R²)

Koefisien Korelasi (R)

Analisis korelasi ganda digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel bebas atau lebih yang secara bersama-sama dihubungkan dengan variabel terikatnya sehingga dapat diketahui besarnya sumbangan seluruh variabel bebas yang menjadi objek penelitian terhadap variabel terikatnya. Uji koefisien determinasi ini digunakan untuk menguji seberapa besar persentase variasi dalam variabel independen dapat menjelaskan variasi dependen. Semakin besar R² berarti semakin besar variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh variasi variabel independen. Sebaliknya, semakin kecil R² berarti semakin kecil juga variasi dependen yang dijelaskan oleh variasi variabel independen. Berikut adalah hasil pengujian yang telah dilakukan.

Tabel 4. Uji Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R²)

Model	Model Summary ^b				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.598 ^a	.358	.311	2,764	1,057

a. Predictors: (Constant), SUM_X1, SUM_X2

b. Dependent Variable: SUM_Y

(Sumber: Data primer diolah tahun 2022)

Dari tabel 4 terlihat nilai R sebesar 0,598 atau 59,8 %. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara variabel Latar Belakang Pendidikan (X₁) dan Prosedur Reviu (X₂) terhadap Kualitas Reviu LKPD (Y), karena nilai R hampir mendekati 1. Pada tabel di atas juga dapat diketahui bahwa nilai R² sebesar 0,358 atau 35,8 %. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen Kualitas Reviu LKPD (Y) dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu variabel Latar Belakang Pendidikan (X₁) dan Prosedur Reviu LKPD (X₂) sebesar 35,8 % sedangkan sisanya 64,2 % dapat dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor lain diluar variabel atau variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Berdasarkan hasil uji hipotesis, Latar Belakang Pendidikan dan Prosedur Reviu LKPD berpengaruh terhadap Kualitas Reviu LKPD Provinsi Sulawesi Utara. Hasil menunjukkan bahwa kedua variabel secara bersamaan mempunyai pengaruh positif terhadap Kualitas Reviu LKPD.

Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Terhadap Kualitas Reviu

Hasil penelitian mendapatkan bahwa latar belakang pendidikan APIP secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Reviu LKPD. Penelitian Tarsisius (2017) mengemukakan bahwa Latar belakang pendidikan tidak berpengaruh pada Kualitas Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. APIP pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang melaksanakan Reviu atas LKPD Provinsi Sulawesi Utara berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, namun APIP telah dibekali dengan pelatihan serta memiliki sertifikasi baik Auditor maupun PPUPD dalam melaksanakan pengawasan sehingga mampu melaksanakan reviu atas LKPD.

Pengaruh Prosedur Reviu LKPD terhadap Kualitas Reviu

Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh variabel Prosedur Reviu LKPD dimana secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Reviu LKPD. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori penetapan tujuan (Locke, 1975 dalam Pinder, 1984), yang menyatakan bahwa diperlukan proses untuk menentukan pencapaian suatu tujuan (*goal intensity*). Hasil yang sama diperoleh dari penelitian Widyarini dan Ratnadi (2016) yang menyatakan bahwa prosedur reviu berpengaruh positif pada kualitas reviu LKPD. Hasil ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa pelaksanaan reviu terdiri atas penelusuran angka, permintaan keterangan, dan prosedur analitis. Tanpa prosedur reviu maka kualitas hasil reviu belum dapat memberikan informasi bahwa LKPD telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan sesuai dengan SAP. Prosedur reviu sebagai tahapan dan langkah-langkah dalam melaksanakan reviu merupakan salah satu yang berperan penting dalam menentukan kualitas reviu atas LKPD, dengan kata lain semakin jelas prosedur reviu menyebabkan semakin baik pula kualitas reviu LKPD yang dihasilkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar Belakang Pendidikan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang melaksanakan Reviu tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Hasil Reviu LKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara secara parsial.
2. Prosedur Reviu LKPD berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Hasil Reviu LKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara secara parsial.
3. Sedangkan secara simultan, kedua variabel yaitu Latar Belakang Pendidikan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Prosedur Reviu LKPD berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Hasil Reviu LKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini maka peneliti dapat menyarankan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang pengawasan, dapat melakukan pelatihan terkait Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebelum melaksanakan Reviu LKPD serta melaksanakan setiap tahapan dalam pelaksanaan reviu LKPD sesuai dengan prosedur reviu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah sehingga Reviu LKPD yang dilakukan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Selain itu, perlu adanya penelitian selanjutnya yang mengkaji lebih dalam lagi tentang faktor-faktor yang menentukan Kualitas Reviu LKPD agar topik ini bisa dibahas dengan cakupan yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Arnes, D. (2008). *Menunggu Peran Inspektorat dalam Reviu Laporan Keuangan Daerah*. Majalah Pemeriksaan BPK RI No 116/Edisi Khusus.

- Harhinto, T. (2004). Pengaruh Keahlian dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Studi Empiris Pada KAP di Jawa Timur. Semarang. *Tesis*. Universitas Diponegoro.
- Juanda, A., & Nauli, P. (2018). Pengaruh Proses Reviu Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 23(1), 41-54. <http://jurnal.feb.unila.ac.id/index.php/jak/article/view/89>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2022
- Maulana, A., Djamhuri, A., & Purwanti, L. (2017). Determinan Kualitas Reviu dan Implikasinya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Economia*, Vol. 13, No. 2. <https://journal.uny.ac.id/index.php/economia/article/download/14980/pdf>. Diakses pada tanggal 23 Juli 2022
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akruar
- Pinder, C. C. (1984). *Work Motivation: Theory, Issues, and Application*. Illinois: Scott Foresman, and Company
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tarsisius, N. (2017). Pengaruh Prosedur Review, Latar Belakang Pendidikan, Dan Tekanan Waktu Terhadap Kualitas Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Kupang (Studi Pada Inspektorat Kota Kupang). *Diploma Thesis*. Unika Widya Mandira. <http://repository.unwira.ac.id/1109/>. Diakses pada tanggal 4 Agustus 2022
- Yudha, P. A., Sujana, E., & Purnamawati, I. G. A. (2017) Pengaruh Kompleksitas Audit, Due Professional Care, Tekanan Anggaran Waktu, Dan Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit Dengan Variabel Moderasi Pemahaman Terhadap Sistem Informasi (Studi Empiris Pada Auditor KAP Di Bali). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, Vol. 8, No. 2. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/13483>. Diakses pada tanggal 2 September 2022
- Widyarini, K., & Ratnadi, N. M. D. (2016). Pengaruh Prosedur, Pendidikan, Tekanan Waktu, dan Anggaran Reviu Pada Kualitas Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol. 5, No. 3, 455-488. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/16065/13329>. Diakses pada tanggal 2 Juli 2022
- Website BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. (2022). *BPK Menyerahkan LHP LKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021*. <https://sulut.bpk.go.id/bpk-menyerahkan-lhp-lkpd-provinsi-sulawesi-utara-tahun-anggaran-2021/>. Diakses pada tanggal 14 Juli 2022